

GLOBAL INSIGHT JOURNAL

Jurnal Mahasiswa Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI



<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ>

DOI : <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.3153>

Vol. 02 No. 01 Tahun 2025

Article Informations

Corresponding Email:

ikalnurcahyana@gmail.com

Received: 15/01/2025; Accepted:
07/02/2025; Published: 07/02/2025

RESPON FILIPINA DAN MALAYSIA TERHADAP KLAIM TIONGKOK DI LAUT CHINA SELATAN TAHUN 2013-2020

Muhamad Haikal Nurcahyana¹, Iing Nurdin², Taufan Herdansyah Akbar³

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Laut Cina Selatan merupakan area yang sangat strategis dan merupakan salah satu jalur perdagangan utama dunia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sengketa di wilayah ini timbul akibat adanya klaim atas Nine-Dash Line (Garis Sembilan Garis Putus-Putus), Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal, klaim tumpang tindih, serta isu militerisasi, keberadaan fisik, dan aktivitas penangkapan ikan. Filipina mengklaim kedua wilayah ini berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)-nya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Namun, China juga mengklaimnya sebagai bagian dari Nine-Dash Line. Laut Cina Selatan menjadi penting karena: Jalur perdagangan global, Kekayaan sumber daya ikan, Potensi cadangan minyak dan gas bumi. Upaya Penyelesaian dan Perkembangan, Kasus di Pengadilan Arbitrase Internasional (2013-2016). Filipina mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration, PCA) di Den Haag pada tahun 2013. Tahun 2016, PCA memutuskan bahwa klaim Nine-Dash Line China tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS. Pengadilan juga menyatakan bahwa beberapa aktivitas China di Laut Cina Selatan, termasuk reklamasi pulau dan pelanggaran ZEE Filipina, melanggar hukum internasional. China menolak keputusan tersebut dan tetap melanjutkan aktivitasnya di kawasan sengketa. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya penyelesaian konflik Malaysia, Filipina dan China di Laut China Selatan terus dilakukan. Beberapa pendekatan yang telah diambil antara lain dialog bilateral, Kerangka Kerja ASEAN, Hukum Internasional, Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Namun, progress yang dicapai sejauh ini masih terbatas.

Kata Kunci : China, Filipina, Malaysia, UNCLOS, Laut China Selatan.

ABSTRACT

The South China Sea is a strategic region serving as a major global trade route and possessing vast natural resource potential. Disputes arise due to the following factors: the Nine-Dash Line, the Spratly Islands and Scarborough Shoal, overlapping claims, militarization and physical presence, and fishing activities. The Philippines asserts that these areas are within its Exclusive Economic Zone (EEZ) based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). However, China also claims them as part of its Nine-Dash Line. The South China Sea holds significance because of: Global trade routes, rich fishery resources, potential reserves of oil and natural gas. The case was brought before the International Arbitration Court (2013-2016). The Philippines filed the dispute with the Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague in 2013. In 2016, the PCA ruled that China's Nine-Dash Line claims have no legal basis under UNCLOS. The court also found that several of China's activities in the South China Sea, including island reclamation and violations of the Philippines' EEZ, breached international law. China rejected the ruling and continued its activities in the disputed areas. Despite various challenges, efforts to resolve conflicts among Malaysia, the Philippines, and China in the South China Sea persist. Several approaches have been undertaken, including Bilateral Dialogue, ASEAN Framework, International Law, Dispute Resolution Mechanisms. However, China has refused to participate in arbitration proceedings.

Key Words : China, Phillipines, Malaysia, UNCLOS, South China Sea

1. PENDAHULUAN

Laut China Selatan adalah kawasan maritim yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya laut, baik dari sektor perikanan maupun tambang bawah laut. China, melalui penelitian yang dilakukan, menyatakan adanya keyakinan bahwa terdapat cadangan minyak yang diperkirakan lebih dari 213 miliar barel, jumlah yang sepuluh kali lipat lebih banyak daripada cadangan milik Amerika Serikat. Di sisi lain, Energy Information Administration (EIA) Amerika mengungkapkan bahwa cadangan terbesar di wilayah tersebut berupa gas alam, yang jumlahnya setara dengan cadangan minyak yang dimiliki oleh Qatar, sekitar 900 triliun kaki kubik.

Praktik yang dilakukan oleh negara tersebut menunjukkan bahwa laut pernah berada di bawah penguasaan negara, meskipun dengan mempertimbangkan kepentingan negara lain. Seiring berjalannya waktu, negara-negara lain mulai berupaya menguasai laut yang berbatasan dengan wilayah pantainya, untuk melindungi kepentingan negara dan rakyatnya, seiring dengan berkembangnya konsep laut teritorial.

Dalam sektor perikanan, keamanan, pertanahan, dan berbagai bidang kehidupan lainnya, kepentingan masyarakat dan negara harus dilindungi melalui klaim kekuasaan negara pantai atas wilayah laut tersebut. Negara-negara yang mengklaim wilayah lautnya membuat laut seakan menjadi milik masing-masing negara berdasarkan teritorial yang mereka kuasai.

Laut China Selatan (LTS) adalah wilayah dengan sengketa yang kompleks, termasuk masalah terkait batas wilayah dan klaim teritorial. Negara-negara yang terlibat dalam konflik ini sangat berhati-hati karena sensitivitas isu tersebut. LTS memiliki nilai strategis yang tinggi, kaya akan sumber daya alam, dan merupakan jalur perdagangan vital. Perselisihan mengenai kepemilikan pulau-pulau di kawasan ini dimulai pada 1970-an dan berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya, termasuk 1980-an, 1990-an, dan 2010-an. Sejarahnya, penguasa-penguasa tradisional dari China, Filipina, Malaysia, dan negara lainnya—baik yang terlibat klaim maupun tidak—pernah bersaing untuk menguasai perairan ini.

Nilai strategis yang dimiliki membuat masing-masing negara pengklaim berusaha menjaga kepentingan nasional mereka dengan melakukan berbagai langkah, seperti peluncuran peta nine dash line oleh Tiongkok, pengajuan gugatan Filipina terhadap Tiongkok di Pengadilan Arbitrase Permanen PBB, serta tindakan tegas seperti pembangunan pulau buatan dan keberadaan militer Tiongkok di LCS.

Potensi kekayaan Laut China Selatan yang semakin dapat dieksplorasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar SDA, terutama mineral, minyak bumi dan gas alam. Pemerintah RRC sendiri sangat optimis dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakannya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information Administration EIA), RRT memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak

di kawasan Laut China Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Di samping itu, perairan kawasan Laut China Selatan merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya.

Beberapa negara Asean terutama Malaysia dan Filipina memiliki klaim kedaulatan terhadap sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara bertetangga dekat itu, perairan Laut China Selatan masih dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, seperti yang ditetapkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Memang Brunei tidak mengklaim kepemilikan wilayah atas dua kepulauan itu, sementara Malaysia, menyatakan bahwa sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah kepunyaan mereka.

Show of force dan manuver agresif dan provokatif, dan bahkan, konflik terbuka di kawasan Laut China Selatan telah terjadi sejak 1970, selain telah berlangsung di masa lalu dalam sejarahnya. Hal ini diperlihatkan dengan silih bergantinya kontrol atau penguasa di wilayah itu, yang berdampak pada perubahan nama kawasan perairan tersebut. Bentrokan yang parah tercatat dalam tahun 1974, yang telah menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 Angkatan Laut RRC dan Vietnam kembali terlibat konfrontasi di Spratly, dengan Vietnam kehilangan 70 personil militernya. Angkatan Laut Filipina juga pernah terlibat dalam ketegangan kecil dengan angkatan laut RRC, Vietnam, dan Malaysia. Konflik antara Angkatan Laut Filipina dan RRC pernah terjadi di Dangkalan Karang Scarborough. Begitu pula, antara Angkatan Laut Filipina dan Malaysia, yang sempat memanas setelah kapal dari kedua negara terlibat dalam provokasi yang saling memicu ketegangan. Akibat penolakan Cina terhadap putusan dan aktivitas militernya yang terus berlanjut di Laut Cina Selatan, masalah pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut semakin memburuk. Pertahanan negara sangat terkait dengan kekuatan militer. Untuk mempertahankan kedaulatan dari serangan fisik, negara-negara

berupaya membangun pangkalan militer baik di dalam negeri, di perbatasan, maupun di luar wilayahnya. Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan

Bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Tiongkok, Malaysia, Filipina, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan perairan yang strategis, yang kaya sumber daya alam. Sumber daya alam yang terdapat di Laut Cina Selatan bukan hanya sebatas minyak bumi, gas

Selain kekayaan alam dan bahan mineral, Laut Cina Selatan juga menghasilkan sumber daya laut yang melimpah, terkenal dengan berbagai jenis ikan⁴. Selain itu, kawasan ini juga berperan sebagai jalur perdagangan internasional, yang membuat negara-negara maju menjadikan stabilitas di Laut Cina Selatan sebagai prioritas dalam kebijakan politik luar negeri mereka.

Ketidakjelasan status kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan menjadikan penempatan kekuatan militer di area tersebut sebagai topik penelitian yang menarik, mengingat potensi masalah serius yang dapat ditimbulkannya.", di kemudian hari apabila tidak segera diselesaikan, maka masalah konflik yang terjadi pada wilayah tersebut akan terjadi hal- hal yang berbahaya untuk keberlangsungan kondusifitas Kawasan tersebut dan juga kondusifitas negara – negara dikawasan tersebut , karena Kawasan tersebut rawan dengan konflik , karena kandungan SDA yang terdapat di kawasan tersebut. Maka dari itu hal- hal yang bisa dicegah agar konflik didaerah tersebut tidak terjadi yaitu dengan melakukan diplomasi dengan negara yang ada di Kawasan tersebut dan juga dengan negara yang ingin mengklaim daerah tersebut, agar tidak terjadi konflik yang lebih besar sampai dengan perang. ⁵

Laut Tiongkok Selatan, dengan wilayah laut dan kepulauannya, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa. Kekayaan alamnya, termasuk minyak, gas

bumi, dan sumber daya laut lainnya, menjadikannya area yang diperebutkan. Selain itu, posisinya sebagai jalur pelayaran internasional, terutama untuk perdagangan antara Eropa, Amerika, dan Asia, semakin meningkatkan nilai strategisnya. Pertumbuhan ekonomi pesat di Asia telah mendorong negara-negara, termasuk Tiongkok, negara-negara di kawasan tersebut, dan bahkan Amerika Serikat, untuk berlomba-lomba memperebutkan kendali dan pengaruh di Laut Tiongkok Selatan, yang dianggap sangat strategis dan menguntungkan secara ekonomi. Melihat kondisi politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik saat ini, tampak ketegangan dikawasan tersebut. Dimana Laut China Selatan atau Laut China Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi perhatian di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar seperti Cina dan Amerika dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti dari masalah yang disengketakan adalah seputar klaim wilayah perbatasan (territorial zone). Sengketa Laut China Selatan atau Laut China Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan sengketa di wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan. Permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: Apa yang melatar belakangi terjadinya Sengketa di Wilayah Maritim di Laut China Selatan atau Laut China Selatan? Bagaimana peran Pihak-pihak dalam Sengketa di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah dalam rangka mendukung pembentukan dan pengembangan hukum dan secara praktis sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, para ahli, akademisi, praktisi dan masyarakat.

Selain aktivitas-aktivitas lainnya, Tiongkok secara aktif meningkatkan kehadirannya di wilayah sengketa Laut China Selatan melalui berbagai cara.

Hal ini meliputi penambahan armada kapal penangkap ikan dan kekuatan angkatan lautnya, pembangunan berbagai bangunan dan infrastruktur, serta upaya mendorong warga negara Tiongkok untuk bermukim secara permanen di wilayah-wilayah yang dipersengketakan. Bahkan, Tiongkok telah melakukan latihan perang dengan menggunakan amunisi aktif di perairan Laut China Selatan. Peningkatan anggaran militer Tiongkok sebesar 7,5% pada Maret 2011, yang mencapai 77,9 miliar dolar AS, menunjukkan keseriusan upaya ini. Tiongkok juga tengah mengembangkan kekuatan angkatan laut yang signifikan, dengan rencana akuisisi dua kapal induk dan pembangunan pangkalan udara militer modern yang dilengkapi radar canggih di Pulau Woody, yang merupakan bagian dari Kepulauan Paracel. Pangkalan ini, setelah selesai dibangun, diproyeksikan akan memberikan perlindungan udara bagi Kepulauan Spratly. Aktivitas pembangunan pangkalan dan instalasi militer Tiongkok di Pulau Karang Mischief telah berlangsung sejak tahun 1995 dan terus diperluas pada tahun 1998. Selain itu laut Cina Selatan adalah wilayah air yang sangat penting secara geopolitik. Lebih dari 50% kapal kargo melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Lebih dari 1,6 juta m³ (10 juta barel) minyak mentah per hari melewati Selat Malaka. Kawasan ini memiliki cadangan minyak bumi terbukti sebesar 1,2 km³ (7,7 miliar barel) dengan perkiraan total 4,5 km³ (28 miliar barel). Cadangan gas alamnya diperkirakan sebesar 7.500 km³ (266 triliun kaki kubik). Laporan U.S. Energy Information Administration tahun 2013 menaikkan perkiraan total cadangan minyak disana menjadi 11 miliar barel. Pada tahun 2014, Cina memulai pencarian minyak di perairan yang dipersengketakan dengan Vietnam.³ Menurut kajian Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina, wilayah ini memiliki sepertiga keragaman hayati laut dunia. Karena itu, Laut Cina Selatan merupakan daerah yang sangat penting bagi ekosistem. Akan tetapi, populasi ikan di daerah ini semakin berkurang dan negara-negara yang berbatasan dengan laut ini menerapkan larangan penangkapan ikan untuk mempertegas klaim kedaulatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eskalasi konflik terjadi antara RRT dan negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

2. PEMBAHASAN

Akibat Perselisihan Cina Terhadap Filipina dan Malaysia Dalam Kepemilikan Laut Cina Selatan

Akar konflik di Laut Cina Selatan bisa ditelaah hingga ke akhir abad ke-19 ketika Inggris memulai klaim atas wilayah tersebut. Sejak saat itu, perairan ini menjadi ajang perebutan pengaruh antara berbagai negara, termasuk Cina, Perancis, dan Jepang. Setelah Perang Dunia II, Filipina juga turut serta dalam persaingan klaim ini. Seiring berjalananya waktu dan perkembangan dunia, kepentingan terhadap Laut Cina Selatan semakin meningkat, sehingga memicu perlombaan yang lebih tinggi antara negara-negara penuntut.

Konflik di Laut Cina Selatan berakar dari perbedaan pandangan mengenai sejarah kawasan. Masing-masing negara berusaha membenarkan klaim wilayahnya dengan mengutip bukti-bukti sejarah, seperti yang dilakukan Tiongkok dengan merujuk pada temuan arkeologi di Kepulauan Paracel. Namun, tumpang tindihnya klaim-klaim historis ini, yang seringkali kurang didukung oleh landasan hukum yang kuat, telah menciptakan situasi yang tidak kondusif dan memicu ketegangan di kawasan.

Ketiga negara Tiongkok, Filipina dan Malaysia, sama-sama mengklaim kepemilikan atas ZEE. China berpegang pada catatan sejarah dan temuan kuno, sedangkan mengacu pada keputusan kaisar mereka di masa lalu dan aktivitas nelayan mereka di wilayah ZEE tersebut.

Sebelum menjadi sengketa, Kepulauan Spratly adalah wilayah tak bertuan. Filipina keberatan kepada Tiongkok karena telah mengklaim ZEE wilayah Laut Milik Filipina. Malaysia juga turut mengklaim dan menduduki beberapa pulau di Spratly, memperkuat klaim mereka dengan alasan serupa.

Sengketa kepemilikan di Kepulauan Spratly melibatkan Malaysia yang mengklaim sebagian wilayah berdasarkan peta batas laut 1979. dan Filipina mengajukan keberatan kepada Tiongkok karena telah masuk ke wilayah ZEE mereka

Konflik perebutan wilayah di Laut Cina Selatan berakar dari perbedaan penafsiran sejarah. Selain menyebabkan klaim yang saling tumpang tindih, perbedaan ini juga tercermin dalam beragam penamaan wilayah laut dan pulau-pulau di dalamnya. Nama "Laut Cina Selatan" yang umum kita dengar saat ini adalah istilah dalam bahasa Inggris. Menariknya, pada abad ke-16, para pelaut Portugis menyebutnya dengan nama yang berbeda, yaitu MarDa Cina.

Untuk membedakan wilayah perairan ini, nama "Laut Cina Selatan" akhirnya ditetapkan. Meski demikian, penamaan ini tidak konsisten di antara negara-

negara pesisir. Setiap negara cenderung memberi nama yang mencerminkan klaim historis dan kepentingan nasionalnya terhadap wilayah laut tersebut. Sebagai contoh, Vietnam secara resmi menggunakan "Bien Dong" (Laut Timur) dalam peta-petanya, menunjukkan klaim historis mereka. Di Filipina, bagian utara yang berdekatan dengan Pulau Luzon sering disebut "Dagat Luzon" dalam peta lokal, namun nama "Dagat Timog Tsina" (Laut Cina Selatan) masih umum digunakan untuk keseluruhan wilayah tersebut, mencerminkan pengaruh budaya dan sejarah yang lebih luas.

Persaingan memperebutkan kekuasaan dan sumber daya di Laut Cina Selatan telah memunculkan perbedaan penamaan yang signifikan pada wilayah perairan dan kepulauannya. Setiap negara di kawasan ini memiliki klaim historis dan budaya yang berbeda terhadap wilayah tersebut, yang seringkali tumpang tindih dan menjadi sumber konflik. Nama "Spratly", misalnya, hanyalah satu dari sekian banyak contoh perbedaan penamaan yang mencerminkan kompleksitas sengketa wilayah di kawasan ini.

Konflik di wilayah Laut China Selatan timbul akibat klaim wilayah yang ekstensif oleh Tiongkok, yang saling bertentangan dengan klaim negara-negara tetangganya. Perebutan sumber daya alam yang kaya, khususnya minyak dan gas, menjadi faktor utama yang memicu ketegangan dan konflik berkelanjutan di kawasan tersebut.

Wilayah Laut China Selatan menjadi pusat perebutan kepentingan global karena kaya akan sumber daya alam dan lokasinya yang strategis bagi jalur perdagangan internasional. Tiongkok, dengan ambisi menjadi kekuatan maritim dunia, berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan ASEAN melalui berbagai cara, termasuk diplomasi agresif dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan 'politik lidah api' yang diterapkan Tiongkok bertujuan untuk membujuk negara-negara ASEAN agar lebih condong ke arah kepentingan Tiongkok. Dorongan kuat Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan didasari oleh potensi ekonomi yang sangat besar, yang tidak hanya akan memperkuat posisi ekonomi Tiongkok di tingkat global, tetapi juga memenuhi sebagian besar kebutuhan domestiknya. Penyelesaian konflik ini tidak akan diakui oleh Tiongkok apabila melaui penyelesaian konflik bilateral dan juga multilateral yang ada negara yang tidak berkepentingan maka Tiongkok akan menerima penyelesaian konflik lewat multilateral yang hanya diikuti negara - negara yang terlibat konflik saja, Maka peran ASEAN sangat diperlukan agar wadah perundingan diplomasi dapat digagas oleh ASEAN yang notabene adalah Lembaga yang berwenang dikawasan Asia Tenggara untuk mewadahi masalah-masalah yang dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara yaitu mulai dari masalah- masalah kecil sampai masalah besar seperti konflik dan saya juga akan merinci penyelesaian masalahnya dari bilateral sampai multilateral

Upaya Penyelesaian dan Perkembangan

1. Kasus di Pengadilan Arbitrase Internasional (2013-2016):

Filipina mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*, PCA) di Den Haag pada tahun 2013.

- Putusan (2016):

- Berdasarkan UNCLOS, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) menolak klaim Nine-Dash Line Tiongkok. Putusan ini juga menyatakan bahwa aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan, termasuk reklamasi pulau dan memasuki ZEE Filipina, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

- Reaksi China:

- China menolak keputusan tersebut dan tetap melanjutkan aktivitasnya di kawasan sengketa.

2. Diplomasi dan Ketegangan Berkelanjutan:

- Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte lebih memilih pendekatan negosiasi dengan China, tetapi ketegangan tetap muncul terkait aktivitas kapal militer dan nelayan China di ZEE Filipina.

- Keterlibatan AS:

- Amerika Serikat mendukung Filipina dan negara lain di kawasan melalui patroli kebebasan navigasi (FONOP) untuk menantang klaim China.

3. Krisis Kapal Penjaga Pantai:

Insiden terbaru sering melibatkan kapal penjaga pantai China yang menghadang kapal Filipina di wilayah sengketa, seperti di Second Thomas Shoal pada tahun 2020.

Dampak Konflik

1. Keamanan Regional: Ketegangan ini meningkatkan risiko militerisasi di Asia Tenggara dan mendorong negara-negara seperti Filipina dan Vietnam memperkuat aliansi dengan negara besar seperti AS.
2. Ekonomi Lokal: Nelayan Filipina sering menjadi korban karena kapal mereka dihalangi oleh China di wilayah yang kaya ikan.
3. Isu Kedaulatan: Konflik ini menjadi ujian bagi sistem hukum internasional dan diplomasi multilateral di kawasan.

Penyelesaian konflik Laut China Selatan antara Malaysia dan Tiongkok

Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan terus dilakukan. Beberapa pendekatan yang telah diambil antara lain:

1. Dialog Bilateral: Malaysia dan Tiongkok telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa secara bilateral. Namun, progress yang dicapai sejauh ini masih terbatas.
2. Kerangka Kerja ASEAN: ASEAN telah berupaya memfasilitasi dialog diantara negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct/DoC) merupakan salah satu hasil dari upaya ASEAN ini.
4. Hukum Internasional: Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut (UNCLOS) berfungsi sebagai pedoman hukum internasional untuk menyelesaikan perselisihan di bidang maritim. Namun, Tiongkok belum sepenuhnya mengesahkan UNCLOS.
5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Arbitrase internasional merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, Tiongkok menolak untuk mengikuti proses arbitrase.

3. KESIMPULAN

Laut China Selatan, sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, telah menjadi pusat perebutan pengaruh antara berbagai negara, terutama Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Klaim sepihak Tiongkok atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan telah memicu ketegangan dan mengancam stabilitas kawasan. Negara-negara ASEAN telah berupaya keras untuk mendorong dialog dan negosiasi guna mencapai penyelesaian damai atas sengketa ini, namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang signifikan. Pentingnya Laut China Selatan bagi perekonomian global dan keamanan maritim menuntut semua pihak untuk berkomitmen pada penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional.

"Tiongkok secara konsisten menunjukkan sikap agresif di Laut China Selatan, yang berimbang langsung pada kepentingan nasional Indonesia. Tindakan seperti klaim sepihak terhadap wilayah laut Indonesia, pembangunan pulau-pulau buatan yang dilengkapi fasilitas militer, dan peningkatan kehadiran kapal-kapal perang telah melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas kawasan. Lebih jauh lagi, aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Natuna oleh kapal-kapal Tiongkok menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak berdaulat Indonesia dan semakin mengintensifkan ketegangan.

Perselisihan di Laut China Selatan bermula dari klaim historis Tiongkok yang diwujudkan dalam garis sembilan putus-putus (*nine-dash line*). Garis ini secara sepihak mengklaim hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok, yang menyebabkan konflik dengan negara-negara di sekitarnya. Sebagai respons, Filipina membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional untuk mencari solusi melalui jalur hukum.

Tiongkok telah menciptakan situasi yang sangat menantang di Laut China Selatan, mengancam kedaulatan dan stabilitas di kawasan. Upaya Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk mempertahankan hak-hak mereka dihadapkan pada tindakan sepihak Tiongkok yang melanggar hukum internasional.

Ketegangan yang tinggi, ketidakpastian hukum, dan kesulitan dalam diplomasi telah menjadi beban berat bagi negara-negara ASEAN.

Filipina serta Malaysia telah mengalami sejumlah dampak signifikan, terutama dalam ranah politik dan pertahanan. Keterlibatan aktif Filipina serta Malaysia dalam menjaga perdamaian regional telah meningkatkan reputasi negara sebagai aktor kunci dalam stabilitas kawasan. Di samping itu, langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas militer dan mengamankan wilayah Natuna telah berkontribusi pada penegakan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia dan juga kepada Filipina dan Malaysia

Keputusan arbitrase internasional tahun 2016 terkait sengketa Laut China Selatan belum berhasil mendamaikan berbagai pihak yang bersengketa. Tiongkok, yang mendasarkan klaimnya pada peta historis 'nine-dash line', secara tegas menolak putusan tersebut. Negara ini tetap berpegang teguh pada klaim historisnya dan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankannya, yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan perselisihan dengan negara-negara di kawasan.

Tiongkok, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan sumber daya alam. Mereka percaya bahwa dengan menguasai Laut China Selatan yang kaya akan berbagai macam sumber daya, mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk menguasai wilayah tersebut.

Di bidang hukum, Indonesia dan Filipina dan Malaysia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS, dan menghasilkan dukungan internasional atas upaya penegakan hukum. Secara ekonomi, dampaknya mencakup pemastian pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional.

Beberapa nilai yang dapat digarisbawahi atas strategi Filipina dan Malaysia dalam menghadapi Tiongkok pada konflik di wilayah Laut China Selatan adalah sebagai berikut:

- Studi ini menunjukkan bahwa Filipina dan Malaysia telah meningkatkan upaya untuk melindungi kedaulatan wilayah Natuna di tengah sengketa dengan Tiongkok.
- Dalam menghadapi situasi yang sama, Filipina serta Malaysia telah menunjukkan ketegasan dalam merespons pelanggaran kedaulatan, namun secara bersamaan juga mengedepankan diplomasi sebagai instrumen utama dalam mengelola konflik."
- Meskipun Filipina dan Malaysia juga berkontribusi, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk kerja sama regional yang menjunjung tinggi hukum internasional.
- Kesempatan untuk Kolaborasi: Kesimpulan ini memberikan pandangan bahwa konflik ini juga membuka peluang bagi Filipina dan Malaysia untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan negara-negara ASEAN dan mitra regional lainnya dalam rangka menciptakan stabilitas yang lebih besar di wilayah Laut China Selatan.
- Keberlanjutan Diplomasi dan Dialog: Dalam penelitian ini, terlihat bahwa keberlanjutan diplomasi dan dialog akan menjadi kunci dalam mengatasi konflik di Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito dan Setiawan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Jejak Publisher.

BBC online *Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan* .(2011) diakses pada 26 pebruari 2013.

BBC online *Sengketa kepemilikan Laut China Selatan* . (2011) diakses pada 26 pebruari 2013

Bond Larry. (2021) *Shattered Trident Konflik laut China Selatan*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Bongdan dan Biklen. (2006). Qualitative research for education: An introduction to theories and methods.

Drs Yanuar Ikbar, MA., Ph.D. (2014) *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Hadiwinata., (2018) *The Histori of the Peloponnesian War* The Art of War (512BC).

Kusumah Indra Pratama Wildan . R ., Supritana Nana., kusmani Yani (2018) Jalan Dama i Menuju Keamanan Regional : Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* , Vol.7, No.2 2018.

Munhar, Junef. *Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan* . <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/420/pdf>

Nainggolan Partogi Poltak, Victor Simela, Roza Rizky Muhamad .(2013) *Rivalitas Amerika Serikat – Tiongkok di Laut China Selatan dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia*.

Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini, Mifta Hanifah* "Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration." *Diponegoro Law Review*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 1-9.

Poltak Partogi Nainggolan, Simela Victor , Muhamad Rizky Roza. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*.opac.ut.ac.id

R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, Yani Kusmarni Jalan Damai Menuju keamanan regional Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan.

Republika Online (2011 20 Juni) *Cina Latihan Perang di Laut Cina Selatan*. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/11/03/144251-cina-latihanperang-di-laut-cina-selatan>

Sartono, Sartono. "Kebijakan dan Upaya Mitigasi Malaysia dalam Mengatasi Ancaman di Laut China Selatan." *Jurnal Education and Development*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 350-356.

Soekanto Soerjono (2002) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, hlm. 242

Steans Jill dan Pettiford Lloyd. (2009) *Hubungan Internasional perspektif dan Tema*

Sutyo Bakir .R (2009) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* . Karisma Publishing Group , hlm.348

Tzu Sun *The Histori of the Peloponnesian War*, The Art of War (512BC)

Usman, Asnani dan Sukma Rizal. (1997) *Konflik laut China Selatan tantangan bagi Asean*. Jakarta: